

INTISARI

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tujuan mengetahui peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam persaingan usaha yang sehat menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder, sedangkan penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer. Responden dalam penelitian ini adalah kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Law Office, Lubis, Santosa, Maulana dan PT. Nusantara Sejahtera Rakyat (NSR). Sedangkan narasumbernya adalah lembaga kajian persaingan usaha Universitas Indonesia.

Hasil penelitian yang diperoleh sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sampai sekarang telah banyak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut. Diantara kasus yang ditangani oleh KPPU dan telah diputuskan adalah perkara Nomor 03/KPPU-I/2002 tentang tender penjualan saham dan obligasi (convertible bonds PT. Holdiko Perkasa dan convertible bonds BPPN) PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk dan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2002 tentang kasus Cineplex 21. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPPU masih mengalami hambatan-hambatan dikarenakan isi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 masih banyak terdapat kelemahan-kelemahannya. Kelemahan-kelemahan tersebut terdapat didalam Pasal 35, 36, 41, 42, 43, 45, 46 dan 50. Pasal-pasal tersebut menjadikan kurang efektifnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU, sehingga pasal-pasal tersebut hendaknya direvisi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat demi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kata Kunci : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ABSTRACT

This is a juridical normative research, which aims to study the role of the Commission for the Supervision of Business Competition in a fair business competition according to the Act number 5 year 1999. It conducted a library research to obtain the secondary data and a field research to obtain the primary data. The respondents are from the office of the Commission for the Supervision of Business Competition, Law office, Lubis, Santosa, Maulana, and *PT. Nusantara Sejahtera Rakyat (NSR)*. The information resource is the Center for Business Competition Study, University of Indonesia.

The research found since after the issuance of this Act, there have been many cases of violation against it. Among the cases handled and solved by the Commission (KPPU) are the Case number 03/KPPU-I/2002 on the bid for shares and bonds (convertible bonds of *PT. Holdiko Perkasa* and convertible bonds of BPPN) of *PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk* and the KPPU decision number 05/KPPU-L/2002 on the case of *Cineplex 21*. In performing its function and authority, the KPPU still encounters some problems arising from the content of the Act number 5 year 1999 that has some weaknesses, for instance, in the articles 35, 36, 41, 42, 43, 45, 46 and 50. They cause the law enforcement by the KPPU to be so ineffective that the House of Representative should revise them for the sake of Law enforcement for business competition in Indonesia.

Keywords : The Act number 5 year 1999, The Commission for the Supervision of Business Competition.